

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku memilih merupakan hal yang selalu menarik untuk dikaji dan dibahas. Khususnya perilaku memilih kelompok masyarakat minoritas, yang dalam hal ini adalah etnis Tionghoa di Indonesia. Tionghoa merupakan salah satu etnis minoritas yang ada di Indonesia dan sudah ada sejak jaman dahulu, bahkan sebelum era penjajahan Belanda. Sebagai etnis minoritas, sejarah mencatat bahwa partisipasi politiknya tidak sebebaskan etnis lainnya seperti Jawa, Sunda, dan lain-lain yang merupakan etnis “asli” dan jumlahnya lebih banyak. Keturunan Tionghoa di Indonesia awalnya bahkan dapat dianggap cukup pasif dalam bidang politik. Keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik dapat ditelusuri melalui sejarah pergerakannya.

Pada awalnya yang menjadi orientasi dari kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia adalah berdagang dan menyebarkan agama. Salah satunya agama Islam yang disebarkan oleh Laksanama Cheng Ho pada abad ke-15 (Tan, 2008). Namun dengan berbagai permasalahan dan diskriminasi yang timbul di kemudian hari, memicu etnis Tionghoa untuk turut andil dalam politik. Hal ini bermula ketika pemerintah baik dari jaman penjajahan sampai era kemerdekaan bersikap diskriminatif terhadap eksistensi etnis Tionghoa.

Salah satu kebijakan paling awal yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap etnis Tionghoa adalah sistem opsir yang diterapkan pada awal abad ke-17 (Suryadinata, 2002). Pemerintah Hindia Belanda menunjuk satu orang dari etnis Tionghoa untuk dijadikan seorang opsir atau yang kala itu disebut sebagai Kapitein. Gelar ini diberikan kepada kepala kelompok dari suatu etnis dalam hal ini adalah etnis Tionghoa. Seorang Kapitein mendapatkan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus kelompok etnisnya terkait agama dan adat istiadat. Sistem ini pada awalnya efektif untuk mengontrol pergerakan etnis Tionghoa, sampai pada akhirnya kekuatan etnis Tionghoa dianggap membahayakan sehingga dilakukan pembantaian pada tahun 1740 untuk menekan kembali etnis Tionghoa.

Sistem ini kemudian dihapus pada awal abad ke-20 karena dianggap tidak lagi berguna dan muncul protes dari etnis Tionghoa yang menganggap eksistensi sistem opsir hanya demi keuntungan pihak Belanda dan tidak menghormati etnis Tionghoa.

Sistem kedua adalah pemisahan pemukiman. Etnis Tionghoa ditempatkan untuk tinggal di kota dalam suatu kawasan khusus yang dikenal dengan nama pecinan. Sedangkan pribumi tinggal di desa jauh dari perkotaan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah administrasi oleh pihak pemerintah kolonial apabila ingin menunjuk seorang kepala kelompok etnis. Kemudian pemisahan antara etnis Tionghoa dan pribumi bertujuan untuk menjaga stabilitas dan menghindari adanya goncangan. Selain itu pemerintahan Hindia Belanda juga diuntungkan secara ekonomi dan politik karena segala kegiatan etnis Tionghoa dapat lebih mudah diawasi pergerakannya, demi menghindari peluang terjadi perlawanan di masa mendatang.

Kemudian sistem selanjutnya yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah sistem status. Sistem ini membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 4 golongan (Suryadinata, 2002). Golongan pertama diisi oleh orang Eropa, golongan kedua orang-orang yang disejajarkan dengan orang Eropa, golongan ketiga pribumi, dan golongan keempat adalah etnis Tionghoa. Pemerintah Hindia Belanda juga mengontrol jalannya perekonomian etnis Tionghoa (Suryadinata, 2002). Modal dan kemampuan ekonomi yang baik dari etnis Tionghoa menyebabkan kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda apabila bisnis VOC dapat terusik. Sehingga para pedagang Tionghoa dibatasi untuk menekan pengaruhnya di pasar. Pasca jatuhnya VOC, kekuatan pedagang Tionghoa kembali menguat. Kemudian muncul kembali kebijakan untuk melarang pedagang Tionghoa dan non-Kristen untuk membawa barangnya langsung dari negara lain ke Batavia. Sehingga etnis Tionghoa menjadi pedagang menengah diantara pedagang besar Eropa dan bisnis kecil pribumi.

Sejarah keterlibatan etnis Tionghoa dalam bidang politik di Indonesia pada era pasca kemerdekaan juga dipengaruhi kebijakan-kebijakan yang pernah

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia terkait keberadaan dari etnis Tionghoa. Pasca kemerdekaan Indonesia, terdapat dua Orde pemerintahan yakni Orde Lama dan Orde Baru. Masing-masing Orde juga memiliki sikap yang berbeda terhadap etnis Tionghoa. Dalam segi politik, pemerintah orde lama memperbolehkan adanya berbagai organisasi masyarakat etnis Tionghoa untuk berdiri. Namun pasca G30SPKI pada tahun 1965 organisasi masyarakat etnis Tionghoa yang dianggap berhaluan kiri mulai dilarang. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Orde Baru karena organisasi Tionghoa dipandang eksklusif, sehingga diharapkan seluruh masyarakat Tionghoa untuk dapat berasimiliasi dengan organisasi pribumi yang sudah ada sebelumnya.

Di sisi lain, dalam hal pendidikan etnis Tionghoa pada awalnya tidak mendapat perhatian khusus. Namun begitu pemerintah semakin kokoh kekuasaannya, semua sekolah mulai diindonesiakan baik mata pelajaran dan tenaga pengajarnya. Sehingga pada tahun 1958 ribuan sekolah berbasis Tionghoa beralih menjadi sekolah dengan basis bahasa Indonesia (Suryadinata, 2002). Namun masih ada beberapa sekolah yang bertahan, sampai pada akhirnya setelah peristiwa G30SPKI yang dianggap memiliki keterlibatan dengan Beijing menyebabkan banyak sekolah Tionghoa pro-Beijing kemudian ditutup.

Kebudayaan juga menjadi hal yang diatur oleh pemerintah, Pembatasan penggunaan bahasa Tionghoa ditekankan untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia. Berbagai koran berbahasa Tionghoa juga ditutup, hanya sebagian kecil yang tetap diperbolehkan untuk beredar. Penggunaan nama berbahasa Tionghoa juga dibatasi dan diarahkan untuk menggunakan nama yang lebih Indonesia. Meskipun ganti nama tidak diwajibkan namun ada tekanan halus yang diberikan oleh pemerintah dengan menganggap penggantian nama sebagai bentuk kesetiaan bagi Indonesia. Dalam hal beragama, etnis Tionghoa memperoleh kebebasannya dalam beragama. Namun pada masa orde Baru, agama konghucu dihapus dan tidak lagi dianggap sebagai agama yang diakui negara. Hal ini disebabkan agama Konghucu yang identik dengan etnis Tionghoa dan pemerintah ingin orang Tionghoa melebur menjadi pribumi.

Masyarakat Tionghoa menyadari tekanan yang diberikan kepada mereka. Secara perlahan mereka melakukan pergerakan khususnya pada bidang politik untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut. Sejarah pergerakan etnis Tionghoa tercatat dimulai pada awal abad ke-20, ketika etnis Tionghoa yang kemudian seiring berjalannya waktu terbagi menjadi Tionghoda *totok* dan Tionghoa peranakan (Suryadinata, 2002). Tionghoa *totok* adalah pendatang baru yang masih memiliki hubungan yang erat dengan China, sehingga berorientasi dengan tanah leluhurnya. Kaum Tionghoa *totok* bahkan sempat mendirikan beberapa organisasi yang berorientasi ke negara China seperti Tionghoa Kwee Koan, Soe Po Sia, dan Siang Hwee. Ketiganya beridir pada awal abad ke-20. Sedangkan Tionghoa peranakan merupakan orang Tionghoa yang lahir dan besar di Hindia Belanda, nama Indonesia saat itu, sehingga lebih berorientasi ke Hindia Belanda.

Pada awalnya kekuatan Tionghoa *totok* lebih besar dari pada Tionghoa peranakan, namun kemudian pada pertengahan tahun 1920-an, perkembangan Tionghoa peranakan semakin meningkat pesat. Menurunnya pengaruh Tionghoa *totok* juga disebabkan terhentinya imigrasi dari China. Meningkatnya kekuatan kaum Tionghoa peranakan menyebabkan munculnya Chung Hwa Hui (CHH) yang didirikan pada tahun 1928 dan merupakan partai pertama yang didirikan oleh Tionghoa peranakan. Namun karena CHH yang terlalu pro-Belanda menyebabkan kaum Tionghoa peranakan yang tidak setuju membentuk partai politik baru yang lebih pro-Indonesia pada tahun 1938 bernama Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Demikian kekuatan kaum Tionghoa peranakan yang mulai bangkit terbagi kembali. Namun terbaginya kekuatan antara Tionghoa peranakan tidak berlangsung lama. Begitu Indonesia merdeka pada tahun 1945, PTI menjadi semakin kuat meski sebelumnya kekuatannya sempat sebanding dengan CHH. Berkembangnya PTI diikuti oleh beberapa perubahan nama menjadi Persatuan Tionghoa (1948), Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI) pada tahun 1950.

Pada tahun 1954 PDTI melebur bersama organisasi peranakan yang lain menjadi sebuah organisasi sosial politik yang baru dan berorientasi Indonesia. Organisasi ini bernama Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia

(Baperki). Namun sikap Baperki yang dianggap terlalu kekirian dan cenderung memisahkan diri dari masyarakat pribumo menyebabkan kekecewaan dikalangan pemuda peranakan. Kekecewaan ini kemudian memuncak dan menghasilkan organisasi baru bernama Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB). Organisasi inilah yang menyuarakan asimilasi penuh dari kaum minoritas Tionghoa ke dalam kaum pribumi. Inilah yang menjadi puncak dari pergerakan kaum Tionghoa yang berorientasi ke Indonesia.

Meski kekuatan Tionghoa peranakan semakin berkembang, Tionghoa *totok* tetap berusaha untuk mempertahankan prinsipnya dengan berorientasi ke negara asal mereka. Kemudian Tionghoa *totok* ini terbelah menjadi dua kelompok yaitu yang berorientasi ke Taipei dan yang berorientasi ke Peking. Barulah pada awal 1960-an, prinsip sebagian kaum Tionghoa *totok* ini mulai pudar dan perlahan bergeser menjadi pro-Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa surat kabar berbahasa mandarin yang diterbitkan saat itu. Namun sikap ini hanya ditunjukkan sebagian kecil dari kaum Tionghoa *totok* bila dibandingkan dengan yang masih berorientasi ke China. Sejarah diatas menunjukkan bahwa kesadaran politik orang Tionghoa sudah ada sejak lama dan dilandasi oleh kesadaran bahwa pentingnya keterlibatan dalam politik untuk membela kepentingan orang Tionghoa yang pada waktu itu termarginalkan.

Etnis Tionghoa pada awalnya tidak memiliki kesadaran politik yang cukup untuk melakukan suatu pergerakan. Sampai pada awal abad ke-20 mulai terbentuk banyak organisasi berbasis Tionghoa dengan berbagai orientasinya. Sampai pada kemerdekaan Indonesia, setidaknya pergerakan etnis Tionghoa selalu dilandasi pada kesamaan identitas. Hal ini menunjukkan bagaimana besarnya pengaruh identitas dalam membangun kekuatan politik etnis Tionghoa. Barulah pada saat memasuki era Orde Baru yang menggalakkan asimilasi dan peleburan, etnis Tionghoa mulai masuk ke berbagai kelompok dan organisasi milik atau bersama pribumi. Hal ini ditunjukkan melalui terciptanya kerjasama antara etnis Tionghoa dengan pribumi baik dari segi pergerakan sampai pada hal ekonomi. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi stigma eksklusif etnis Tionghoa. Selain itu,

tercetus juga ide sebagian etnis Tionghoa untuk mengubah agamanya menjadi Islam untuk memperlancar proses asimilasi dengan pribumi. Kemudian juga muncul ide untuk merestrukturasi perekonomian Indonesia. Menyadari munculnya sentimen terhadap etnis Tionghoa seringkali karena permasalahan ekonomi.

Namun meski begitu masih sulit bagi kelompok minoritas Tionghoa untuk dapat berperan dalam panggung perpolitikan di Indonesia. Sepanjang era Orde Baru tidak seorang pun menteri diangkat dari etnis Tionghoa, kecuali kabinet terakhir yang hanya berumur sebulan sebelum turunnya Soeharto. Disisi lain kedekatan beberapa tokoh Tionghoa dengan penguasa tidak dapat dipungkiri. Orang-orang ini yang kemudian mewakili kepentingan minoritas Tionghoa kepada para penguasa. Sistem cukong yang marak pada jaman Orde Baru juga menjadi saluran aspirasi etnis Tionghoa kepada penguasa.

Pasca jatuhnya Orde Baru, ada tendensi untuk kembali merangkul orang Tionghoa. Beberapa usaha dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih nyaman dan aman bagi etnis Tionghoa. Perubahan besar tersebut dimulai oleh kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang menghapus kekakngan terhadap budaya etnis Tionghoa dengan mencabut Inpres Nomor 14 tahun 1967 mengenai larangan pertunjukan kebudayaan Tionghoa. Bahkan salah satu menteri beliau merupakan etnis Tionghoa bernama Kwik Kian Gie yang diamanahkan sebagai Menteri Koordinator Ekonomi. Pasca jatuhnya Gus Dur, etnis Tionghoa tetap diperhatikan oleh pemerintahan Presiden Megawati yang menetapkan hari raya Imlek sebagai salah satu dari hari libur nasional pada tahun 2012. Presiden selanjutnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono juga mengangkat seorang menteri perempuan pertama dari etnis Tionghoa. Bahkan pada era ini, presiden menghapus istilah “Cina” yang dianggap diskriminatif dan diganti dengan istilah Tionghoa.

Berbagai sikap pemerintah pasca reformasi menunjukkan bahwa etnis Tionghoa mulai diperhitungkan dalam dunia politik, namun tentunya membutuhkan proses. Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya 3 partai politik oleh etnis Tionghoa menjelang Pemilu 1999. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia,

Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, dan Partai Pembauran Indonesia. Pada Pemilu 2004 juga etnis Tionghoa mencoba untuk berdinamika dalam pemilihan. Namun baik pada Pemilu 1999 maupun 2004 etnis Tionghoa kurang mampu mengangkat namanya. Karena pada masa itu masyarakat Tionghoa kebanyakan belum tertarik pada politik akibat masih terasa dampak dari kebijakan Orde Baru yang memfokuskan orang Tionghoa pada bidang ekonomi.

Namun begitu muncul Kwik Kian Gie sebagai menteri beretnis Tionghoa pertama, hal ini mulai menarik perhatian etnis Tionghoa kepada politik. Kemudian menjadi efek domino dengan meningkatnya partisipasi pemilih dari etnis Tionghoa setiap tahunnya. Pada pemilu 2009 partisipasi masyarakat Tionghoa di bidang politik semakin besar. Hal ini diawali dengan lahirnya Undang-undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik. Sehingga banyak dari etnis Tionghoa yang bergabung dengan partai-partai yang sudah ada. Bahkan dikemudian hari calon dari etnis Tionghoa juga mulai diterima baik dari etnis Tionghoa itu sendiri maupun kelompok masyarakat lainnya. Salah satu contoh nyata adalah kemenangan Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI 2012. Untuk pertama kalinya, ibukota DKI Jakarta dipimpin oleh seorang etnis minoritas Tionghoa. Selain itu di daerah lainnya juga mulai banyak bermunculan calon legislatif dari etnis Tionghoa.

Partisipasi etnis Tionghoa juga diperkirakan mengalami peningkatan dalam Pemilu 2019. Terdapat peningkatan jumlah calon legislatif dari etnis Tionghoa juga pemilih dari etnis Tionghoa. Salah satu contohnya adalah keikutsertaan partai baru bernama Partai Solidaritas Indonesia yang didirikan dan dipimpin oleh seorang etnis Tionghoa bernama Grace Natalie. Sebagai partai debut, PSI tidak mampu lolos ke DPR RI karena terhalang ambang batas parlemen sebesar 4% sedangkan PSI hanya mampu meraup suara 1,89% pada tingkat nasional. Namun hal menarik muncul pada daerah pemilihan DKI Jakarta karena PSI sebagai partai debut mampu mencapai peringkat 4 suara terbanyak di DKI Jakarta setelah PDIP, PKS, dan Gerindra dengan perolehan suara sebesar 8,6% atau 502.579 suara. Bahkan ketua umum PSI, Grace Natalie menjadi calon legislatif DPR RI dengan perolehan suara tertinggi di Dapil DKI Jakarta III sebesar 179.949 suara. Hal ini tentunya

mengejutkan mengingat bahwa Ketua Umum PSI merupakan etnis tionghoa yang merupakan etnis minoritas. Tokoh-tokoh penting PSI lainnya juga sebagian merupakan etnis minoritas.

Tidak lupa kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama menjelang Pilkada DKI 2017 semakin mempertajam sensitifitas antara mayoritas dengan minoritas. Melalui fakta tersebut, dapat diperkirakan bahwa pemilih PSI khususnya Grace Natalie sebagian besar merupakan masyarakat etnis Tionghoa. Perolehan suara Grace Natalie yang sangat tinggi di Jakarta Barat dan Utara juga sejalan dengan fakta bahwa sebagian besar masyarakat etnis tionghoa di DKI Jakarta bertempat tinggal di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. PSI merupakan bukti nyata dari keterlibatan politik oleh etnis Tionghoa khususnya dari kalangan berpendidikan. Namun bagaimanakah dengan pemilih dari etnis Tionghoa yang banyak dari mereka masih awam dengan dunia politik?

Selain PSI menunjukkan eksistensi politisi Tionghoa, PSI juga membawa narasi pluralitas dan narasi toleransi yang sangat ramah minoritas, salah satunya etnis Tionghoa. Dengan narasi keberagamannya, partai ini kemudian memiliki tempatnya tersendiri dikalangan minoritas yang merasa dibawa kepentingannya oleh PSI. Selain itu partai lain yang juga kerap menjadi favorit diantara pemilih etnis Tionghoa adalah partai PDIP yang memenangkan Pemilu 2019. Partai ini dikenal memiliki hubungan yang harmonis dengan pemilih dari etnis Tionghoa dengan banyaknya calon legislatif beretnis Tionghoa dari PDIP. Bahkan karena PDIP sudah ada lebih dahulu, sudah terdapat basis pemilih PDIP di kalangan etnis Tionghoa. Artinya kepercayaan masyarakat etnis Tionghoa terhadap PDIP sudah cukup kuat.

Melihat fakta yang terjadi ketika Pemilu Legislatif 2019, dapat diasumsikan bahwa partisipasi etnis Tionghoa di DKI sangat signifikan. Atas dasar hal inilah, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perilaku memilih etnis tionghoa sebagai warga negara etnis minoritas dalam Pemilu Legislatif 2019 di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Perilaku politik warga negara merupakan segala kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Sitepu,

2012). Perilaku politik pemilih tidak terlepas dari realitas sosial dan politik yang dipengaruhi baik eksternal maupun internal (Upe, 2008). Artinya dengan melihat sejarah etnis Tionghoa di Indonesia dapat memberikan sedikit gambaran mengenai perilaku politiknya saat ini.

Asumsi bahwa meningkatnya partisipasi pemilih etnis Tionghoa karena makin banyak calon yang merepresentasikan etnis Tionghoa dalam Pemilu 2019, serta asumsi bahwa pemilih etnis Tionghoa mayoritas memilih partai yang ramah minoritas harus dibuktikan melalui penelitian. Sehingga muncul pertanyaan apakah pemilih etnis Tionghoa memilih karena ikatan priordialnya, identifikasi terhadap partainya atau karena memang program yang dibawa oleh calon legislatif. Dengan melakukan penelitian kuantitatif terhadap para pemilih etnis Tionghoa dapat diketahui adakah korelasi antara ikatan primordial, identifikasi kepartaian, dan pemahaman program calon legislatif terhadap pilihan dari pada pemilih etnis Tionghoa dalam Pemilu Legislatif 2019. Kemudian juga dapat diketahui kemanakah dukungan politik terbesar diberikan oleh etnis Tionghoa dan partai apa yang paling banyak dapat meraih suara pemilih etnis Tionghoa. Dengan memahami perilaku politik etnis Tionghoa, barulah dapat disimpulkan apakah negara berhasil dalam memberika pendidikan politik yang baik dan benar bagi seluruh warganya khususnya etnis minoritas seperti etnis Tionghoa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Adakah korelasi antara ikatan primordial pemilih terhadap pilihan politik etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2019?
2. Adakah korelasi antara identifikasi kepartaian pemilih terhadap pilihan politik etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2019?
3. Adakah korelasi antara pemahaman program calon legislatif terhadap pilihan politik etnis tionghoa di Dapil DKI Jakarta III dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya korelasi antara ikatan primordial pemilih terhadap pilihan politik etnis Tionghoa di Dapi DKI Jakarta III dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2019.
2. Untuk mengetahui adanya korelasi antara identifikasi kepartaian pemilih terhadap pilihan politik etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III Pemilu Legislatif DPR RI 2019.
3. Untuk mengetahui adanya korelasi antara pemahaman program calon legislatif terhadap pilihan politik etnis tionghoa di Dapil Jakarta III dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis, harapannya penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengembangkan ranah edukasi dan ilmu pengetahuan, khususnya terkait studi Ilmu Politik dalam teori perilaku memilih.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam membandingkan konsep dan teori. Khususnya bagi peneliti yang ingin meneliti hubungan ikatan primordial, identifikasi kepartaian, dan pemahaman program calon legislatif terhadap pilihan politik etnis Tionghoa.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Politik Identitas

Identitas adalah suatu konsep yang paling mendasar dan digunakan oleh manusia untuk mengidentifikasi sesuatu atau mengenali sesuatu. Eksistensi dari identitas menyebabkan suatu hal menjadi lebih mudah untuk dikenali dan kemudian dipahami. Oleh sebab itu identitas kemudian dipahami menjadi hal yang mendasar dan penting. Identitas ini sangat erat hubungannya dengan perbedaan dan persamaan antar individu yang satu dengan lainnya, antar kelompok yang satu dengan lainnya (Widayanti, 2009). Pada prakteknya, identitas sudah melekat pada

seorang individu sejak lahir, baik fisik maupun non-fisik. Misalnya identitas fisik adalah jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, bentuk wajah, dan lain-lain. Sedangkan identitas non-fisik seperti suku, status keluarga, dan nama yang diberikan.

Identitas tidak hanya menunjukkan persamaan, namun identitas juga menunjukkan perbedaan antar individu maupun kelompok. Hal ini disebabkan adanya kaitan antara identitas dengan kesadaran atau rasa terhadap suatu ikatan kebersamaan, atau rasa saling memiliki. Oleh karenanya ciri-ciri pembeda kemudian juga memiliki peran dalam pembentukan karakteristik identitas, tidak hanya terbatas oleh ikatan kolektif (Setyaningrum, 2005). Identitas akan selalu melekat pada masing-masing individu maupun komunitas. Identitas menjadi karakteristik yang membedakan antar individu juga antar kelompok.

Kepribadian individu dapat tercipta dari identitasnya, bahkan juga posisi individu tersebut terdapat tiga pendekatan pembentukan suatu identitas, yakni pertama primordialisme, identitas yang diperoleh secara alamiah atau turun temurun. Kedua konstruktivisme, identitas yang dibentuk melalui proses sosial yang kompleks. Misalnya melalui ikatan-ikatan kultural dalam suatu masyarakat. ketiga adalah instrumentalisme, identitas adalah hal yang dibentuk atau dikonstruksikan demi kepentingan elit penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya (Widayanti, 2009).

Menyadari pentingnya identitas ini, sering kali identitas dipolitisasi sebagai sarana dan sumberdaya politik (Setyaningrum, 2005). Politik identitas kemudian juga dikenal sebagai biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik sendiri berdasar pada berbagai perbedaan yang muncul dari perbedaan tubuh atau fisik. Di sisi lain Agnes Heller memberikan definisi politik identitas sebagai suatu konsep dan gerakan politik yang memiliki fokus untuk menekankan perbedaan sebagai kategori politik yang utama (Abdilah, 2002).

Setiap komunitas meskipun memiliki dasar ideologi dan tujuan yang sama, tidak dapat dipungkiri bahwa isinya terdiri dari berbagai jenis individu yang memiliki identitas dan kepribadian yang beragam. Ini dikarenakan pada dasarnya identitas dan kepribadian masing-masing individu itu unik dan berbeda, sehingga

besar kemungkinan adanya dominasi antara individu yang masing-masing memiliki ego dan tujuan personal. Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran kepentingan yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan munculnya persaingan untuk memperoleh posisi yang strategis bagi masing-masing individu dalam komunitas tersebut. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa politik identitas menurut para ahli adalah suatu tindakan politik yang diambil oleh seseorang maupun kelompok dengan kesamaan identitas baik dalam hal agama, gender, etnis, dan budaya untuk mengedepankan berbagai kepentingan anggotanya. Sehingga tidak mengherankan apabila politik identitas sering digunakan untuk mencari dukungan dan simpati dari kaum minoritas atau kelompok yang tesisihkan dan termarginalkan.

1.5.2 Partai Politik

Secara sederhana, partai politik dapat diartikan sebagai kelompok terorganisir yang dimana setiap anggotanya memiliki visi, misi, orientasi, ide, dan nilai yang sama (Budiardjo, 1982). Beranjak dari asumsi bahwa dengan membuat suatu wadah organisasi, orang-orang dengan pemikiran yang serupa dapat disatukan dan orientasi kepentingan mereka dapat dikonsolidasikan. Sehingga pengaruh yang mereka berikan dapat berdampak lebih besar terhadap pembuatan keputusan atau kebijakan (Budiardjo, 2008).

Setidaknya ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami asal muasal terbentuknya partai politik (Surbakti, 2010). Pertama adalah pendekatan kelembagaan. Pendekatan ini memperhatikan relasi antara parlemen awal dan munculnya partai politik. Artinya partai politik dibentuk oleh golongan legislatif juga eksekutif karena adanya kebutuhan dari pada anggota parlemen untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dan mengarahkan dukungan masyarakat. Setelah terbentuknya partai politik oleh parlemen dan fungsinya sudah berjalan, sekelompok masyarakat yang sadar politik dan merada tidak tertampung kepentingannya oleh partai yang sudah ada kemudian membentuk partainya sendiri.

Pendekatan pertama tidak hanya dapat ditemui pada wilayah atau negara yang sedang dijajah dan membentuk partai politik untuk menjadi alat mobilisais masyarakat untuk berjuang meraih kemerdekaan. Namun juga bisa ditemukan pada

masyarakat di negara maju yang mana terdapat kelompok masyarakat yang merasa tidak terwakilkan dengan baik kepentingannya dalam sistem kepartaian yang sudah ada, sehingga membangun partainya sendiri. Contohnya adalah Partai Hijau di Jerman, dan Partai Buruh di Inggris.

Pendekatan kedua melihat dari sisi historis, dimana partai politik muncul sebagai usaha suatu sistem politik dalam menyelesaikan krisis yang terjadi dengan melakukan perubahan masyarakat secara luas. Krisis tersebut terjadi pada masa trasisi suatu sistem politik yang disebabkan perubahan struktur masyarakat dari tradisonal yang lebih sederhana menjadi modern yang lebih kompleks. Kondisi ini menyebabkan berbagai perubahan yang berujung pada meningkatnya aspirasi dan bangkitnya gerakan-gerakan populis.

Perubahan tersebut mengakibatkan tiga jenis krisis, yaitu integrasi, legitimasi, dan partisipasi. Partai politik hadir untuk mengatasi ketiga masalah tersebut. Partai politik dengan akar yang kuat di masyarakat diharapkan bisa mengontrol pemerintahan supaya terbentuk suatu pola hubungan kewenangan yang terlegitimasi antara masyarakat dengan pemerintah. Keterbukaan partai politik kepada setiap lapisan masyarakat diharapkan dapat memberikan peran signifikan sebagai pengintegrasikan umum. Maksudnya, menjadi sarana konstitusional untuk memperoleh dan menjaga kekuasaan. Juga sebagai alur bagi partisipasi masyarakat.

Pendekatan ketiga adalah pembangunan yang memandang partai politik sebagai hasil produk dari modernisasi bidang sosial dan ekonomi. Modernisasi yang dimaksud adalah pembangunan teknologi komunikasi yang lebih maju, dan lainnya. Modernisasi tersebut berpengaruh pada lingkungan dan masyarakat sehingga melahirkan sebuah kebutuhan akan wadah organisasi politik yang bisa memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat tersebut. Artinya partai politik adalah produk logis dari modernisasi bidang sosial dan ekonomi.

Setelah mengetahui asal muasal partai politik yang telah dijelaskan melalui tiga pendekatan diatas. Maka dapat diketahui definisi partai politik. Setidaknya terdapat beberapa definisi partai politik menurut para ahli:

1. Menurut Lapalombara dan Weiner (1966), partai politik adalah organisasi dengan kegiatan yang saling berkesinambungan. Maksudnya, masa hidup

partai politik tidak tergantung pada masa hidup dan masa jabatan para pimpinannya. Partai politik juga berakar pada masyarakat lokal dan berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan dengan cara mengikuti pemilihan umum.

2. Soltau (1961) mejabarkan bahwa partai politik sedikit banyak terorganisasikan dan bertindak sebagai kesatuan politik. Dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk membuat suatu kebijakan umum.
3. Carl J, Friedrich (1967) dalam bukunya juga menulis definisi partai politik. Menurut Friedrich, partai politik merupakan sekelompok manusia yang secara stabil terorganisir dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut adalah untuk merebut atau memperoleh serta mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah untuk pemimpin partainya. Sehingga bisa memberikan manfaat bagi anggotanya berupa manfaat yang ideal maupun materiil.
4. Menurut Sigmund Neumann (1963), partai politik adalah suatu organisasi dengan berisikan aktivis-aktivis politik yang berupaya untuk memperoleh penguasaan atas pemerintahan dan berusaha merebut dukungan masyarakat melalui persaingan dengan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda.
5. Giovanni Sartori (1976) dalam bukunya mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok yang ikut serta dalam pemilihan umum dan melalui pemilihan umum tersebut dapat menempatkan calon-calonnya untuk bisa meraih jabatan publik.

Berdasarkan berbagai penjelasan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan kumpulan orang-orang dengan ide dan kepentingan yang sama untuk dapat memperoleh atau mempertahankan kekuasaan melalui partisipasinya dalam pemilihan umum. Lalu hal apa yang membedakan partai politik satu dengan yang lain? Bagaimana cara mengidentifikasi partai? Jawabannya adalah ideologi. Macam-macam dasar ideologi partai politik diantaranya nasionalis, komunis, sosialis, dan konservatif. Dengan mempertimbangkan banyaknya ideologi, partai diklasifikasikan bukan berdasarkan jumlahnya namun jarak antar ideologi.

1.5.3 Pemilu

Pemilu adalah kepanjangan dari pemilihan umum yang artinya sebuah proses untuk memilih orang-orang untuk menduduki kursi dalam pemerintahan. Pemilu umumnya diadakan oleh negara-negara demokrasi untuk mewujudkan nilai demokrasi. Melalui pemilu, pemimpin dan wakil yang terpilih adalah orang yang memperoleh suara terbanyak. Ali Moertopo mendeskripsikan pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945. Tujuannya untuk memilih anggota perwakilan rakyat dalam DPR, DPRD, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk kemudian menjalankan roda pemerintahan. Pada dasarnya pemilu diberbagai negara berebda-beda tergantung pada sistem pemilunya.

Setiap sistem pemilu memiliki tiga variabel utama, yakni penyuaaraan (*balloting*), daerah pemilihan (*electoral district*), dan formula pemilihan (Surbakti, 2010). Pertama, *Balloting* merupakan suatu tata cara yang wajib diikuti oleh pemilih yang memenuhi persyaratan dalam memberikan suara. Pemilih akan dihadapkan pada tiga kemungkinan, yaitu memilih partai, calon, atau keduanya. Hal ini umum dilaksanakan pada negara demokrasi yang beruaha menjaga pluralitas. Kedua, *Electoral district* maksudnya regulasi yang mengatur jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan. Penentuan jumlah kursi didasarkan pada jumlah kursi dan luas wilayah tersebut. Terakhir, formula pemilihan artinya perhitungan yang digunakan untuk menentukan pemenang yang berhasil merebut kursi di suatu daerah pemilihan.

Formula ini dibedakan menjadi tiga, pluralitas, mayoritas, dan perwakilan berimbang. Dalam formula pluralitas, pemenang suatu daerah pemilihan ditentukan melalui perolehan suara yang lebih banyak dari pada calon lainnya tidak peduli selisih suara dekat atau jauh. Formula mayoritas menuntut calon atau partai untuk mencapai jumlah perolehan suara yang melebihi total dari jumlah suara calon lainnya. Kemudian dalam formula perwakilan berimbang, setiap partai politik peserta pemilu memperoleh jumlah kursi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh. Ketiga variabel diatas sifatnya saling berkesinambungan. Namun dari

ketiga variabel tersebut, variabel ketiga dapat dikatakan sebagai variabel terpenting karena kedua variabel lainnya merupakan konsekuensi logis dari formula yang digunakan. Apabila menggunakan formula pluralitas, maka sistem penyuaraanya akan cenderung kategoris dan daerahnya pemilihannya menggunakan sistem distrik (satu distrik diwakili satu kursi). Namun apabila menggunakan formula perwakilan berimbang, maka setiap distrik akan diwakili oleh banyak kursi dan sistem penyuaaran dapat menggunakan keduanya.

Pemilu tentunya memiliki tujuan dalam pelaksanaanya. Setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai melalui pemilu. Pertama, pemilu sebagai mekanisme untuk melakukan seleksi terhadap para calon pejabat pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Sejalan dengan prinsip demokrasi dimana kedaulatan berada ditangan rakyat, namun pelaksanaannya dilakuakn oleh para wakilnya (demokrasi tidak langsung). Oleh sebab itu, pemilu merupakan mekanisme penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya untuk menjadi wakil rakyat. Terkait penentuan alternatif kebijakan, pemerintah biasanya menyelenggarakan pemilu untuk menyeleksi kebijakan umum yang akan diterbitkan (demokrasi langsung). Rakyat akan diberikan pilihan untuk setuju dan tidak setuju terhadap peraturan perundang-undangan yang ditawarkan oleh pemerintah. Jenis pemilu ini disebut juga sebagai referendum.

Kedua, pemilu juga dianggap sebagai mekanisme pemindahan konflik kepentingan yang sebelumnya berada dalam masyarakat kepada parlemen melalui wakil-wakilnya yang terpilih demi menjaga integrasi masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa akan selalu terjadi pertentangan kepentingan, dan dalam demokrasi pertentangan tersebut harus diselesaikan dengan musyawarah demi mencapai konsensus.

Ketiga, pemilu sebagai saran mobilisasi untuk mengalang dukungan publik terhadap negara dan pemerintah dengan ikut serta dalam sebuah proses politik. Poin ini tidak berlaku hanya bagi negara dunia ketiga namun juga negara-negara maju yang menganut demokrasi liberal meskipun memiliki sifat yang berbeda. Hal ini menjawab pertanyaan mengenai alasan negara komunis seperti China

melaksanakan pemilu meskipun hanya dengan satu calon dan membuang biaya besar. Alasannya karena pemilu diperlukan sebagai penyegaran akan antusiasme publik terhadap rezim. Sedangkan dalam negara berkembang, pemilu biasanya dijadikan sebagai alat pembenaran oleh rezim yang memerintah sehingga diperlukan adanya mobilisasi bahkan dengan paksaan fisik kalau diperlukan. Di negara demokrasi liberal pemilu dibutuhkan untuk meyakinkan anggota masyarakat untuk terlibat dalam proses politik.

Indonesia sendiri menetapkan persyaratan bagi peserta pemilu. Pemilih harus merupakan warga negara Indonesia tentunya. Selain itu, pemilih harus berumur minimal 17 tahun atau sudah kawin. Karena pada masyarakat pada usia ini dianggap sudah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat juga negara, sehingga wajar apabila diberikan hak pilih untuk menentukan wakil dan pemimpinnya nanti. Indonesia juga menerapkan suatu asas dalam menjalankan pemilunya. Asas tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Asas tersebut dikenal dengan istilah Luber Jurdil. Kepanjangannya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Langsung artinya rakyat sebagai pemegang hak pilih berhak untuk memilih dalam pemilu secara langsung tanpa adanya perantara. Umum artinya pemilu berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tanpa adanya diskriminasi. Bebas artinya seluruh warga negara yang memegang hak pilih dapat secara bebas menentukan pilihannya tanpa adanya intervensi. Rahasia artinya pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya sehingga orang lain tidak tahu menahu pilihan dari pemilih lain. Jujur artinya seluruh proses pemilu dilaksanakan secara jujur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Adil artinya seluruh pemilih dan peserta pemilu diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan dalam bentuk apapun.

Indonesia menyelenggarakan pemilu sesuai dengan konstitusi UUD 1945, sebagai bentuk dari aplikasi kedaulatan rakyat dalam negara melalui penyelenggaraan sistem demokrasi. Sistem pemilu yang Indonesia gunakan

menurut undang-undang adalah sistem proporsional terbuka. Sistem ini adalah sistem yang memberikan hak masyarakat untuk dapat memilih langsung calon-calon wakil mereka yang nantinya duduk di parlemen. Sehingga harapannya melalui sistem ini para wakil rakyat dapat menjalin kedekatan dengan konstituennya. Dengan begitu akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan fungsinya sebagai wakil rakyat dapat diwujudkan. Rakyat yang memilih wakilnya tersebut dapat menuntut wakilnya untuk berlaku sesuai kepentingan rakyat. Apabila tidak terpenuhi, maka para wakil tersebut akan dihukum oleh rakyat dengan cara tidak dipilih lagi di pemilu selanjutnya.

1.5.4 Perilaku Politik

Segala kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik merupakan perilaku politik (Surbakti, 2010). Kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi dua, yakni fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat dan fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah. Perilaku politik adalah salah satu dari sekian banyak aspek berperilaku secara umum. Disampingnya terdapat perilaku budaya, perilaku keagamaan, perilaku ekonomi, dan lain-lain. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah bagian dari perilaku ekonomi. Tindakan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya merupakan bagian dari perilaku budaya. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya adalah perilaku keagamaan.

Perilaku politik berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan sistem kekuasaan yang memiliki otoritas untuk mengatur arah kehidupan masyarakat menuju suatu tujuan (Sastroatmodjo, 1995). Tujuan yang dimaksud adalah tujuan bersama secara umum, bukan tujuan orang perorang. Usaha yang diperbuat oleh individu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya adalah bagian dari perilaku ekonomi. Namun apabila pemerintah bertindak untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya secara merata, maka tindakan tersebut sudah termasuk dalam perilaku politik, lebih tepatnya perilaku politik ekonomi.

Perilaku politik dapat ditemui dalam berbagai bentuk dan dimensi. Contohnya, pada tingkatan negara, ada pihak yang memerintah dan di sisi lain ada pihak yang diperintah. Kemudian terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang memerintah selalu menimbulkan sikap pro kontra. Diantara banyaknya pihak, yang paling aktif melakukan kegiatan politik adalah pemerintah itu sendiri serta partai politik. Hal ini disebabkan fungsi mereka dalam bidang politik. Di sisi lain keluarga sebagai kelompok kecil dalam masyarakat juga turut dalam kegiatan politik. Misalnya ketika ada anggota keluarga yang mencalonkan diri sehingga anggota keluarga lain ikut berkampanye, atau lebih sederhananya para anggota keluarga yang mendukung salah satu partai politik. Dengan demikian keluarga tersebut sudah terlibat dalam perilaku politik.

Suatu tindakan juga dapat mencakup lebih dari satu jenis perilaku. Artinya tindakan tersebut melibatkan beberapa aspek sekaligus. Contohnya, ada perusahaan yang memperjuangkan pajak masuk yang kecil untuk barang impor. Tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai perilaku ekonomi juga perilaku politik. Dapat dikatakan sebagai perilaku ekonomi karena adanya usaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari bisnis yang dilakukan. Namun juga dapat dikatakan sebagai perilaku politik karena adanya usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Melihat pada penjelasan diatas, maka dapat diketahui perilaku politik sangat luas cakupannya. Di dalamnya memiliki banyak unsur yang saling mengikat. Salah satunya adalah budaya politik. Secara sederhana budaya politik dapat diartikan sebagai suatu fenomena dalam masyarakat, dimana fenomena tersebut berpengaruh terhadap sistem dan struktur politik (Sastroadmodjo, 1995). Lebih jelasnya Almond dan Verba menerjemahkan budaya politik sebagai distribusi berbagai pola orientasi khusus menuju suatu tujuan politik masyarakat bersangkutan. Budaya politik pada dasarnya dimiliki oleh seluruh masyarakat dari berbagai belahan dunia. Begitu pun orang-orang yang hidup di dalam masyarakat juga memiliki orientasi dan persepsi terhadap suatu sistem politik di masyarakatnya. Hal ini terjadi baik dalam masyarakat modern maupun tradisional. Sehingga secara general dapat

dikatakan bahwa kaitannya dalam budaya politik, orang-orang dalam masyarakat itu menilai posisi dan perannya di dalam suatu sistem politik.

Lalu, bagaimana kaitan antara budaya politik dengan perilaku politik? Seorang pemimpin dengan perilaku politiknya maupun masyarakatnya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya politik yang ada. Contohnya, dalam pelaksanaan penyusunan rancangan keputusan politik, pengawasan pelaksanaan, serta dalam menjalankan fungsi dari pada yudikatif kesemuanya itu tidak terlepas dari adanya pengaruh budaya politik dalam bentuk norma, nilai, adat, kebiasaan, tradisi, dan lain-lain.

Begitupun perilaku politik warga negara atau masyarakat seperti penyampaian pendapat, ketidakpuasan, kritik, saran, perebutan posisi politik dan lain-lain turut dipengaruhi oleh budaya politik. Tipe budaya politik yang dimaksud juga mencakup struktur dan sistem politik yang telah dijadikan variabel penting dalam mempengaruhi tindakan masyarakat. Perilaku politik lebih lanjutnya dapat disimpulkan sebagai refleksi dari budaya politik masyarakat yang ragam akan aneka bentuk karakter dan kelompok yang memiliki tingkah laku berbeda-beda.

Perilaku politik disisi lain tidak ditentukan secara temporer, melainkan adanya pola hubungan yang orientasinya terhadap pola umum yang jelas tampak sebagai refleksi budaya politik dan seringkali juga disebut sebagai peradaban politik. Sehingga perilaku politik tumbuh atas dasar suatu kesadaran mendalam mengenai sistem politik atau ideologi yang sedang dianut oleh suatu negara.

Selain budaya politik, struktur politik juga menjadi unsur penting. Kehidupan politik dalam suatu negara berujung pada terwujudnya suatu struktur politik. Struktur politik adalah pelembagaan hubungan antar komponen yang membentuk sebuah sistem politik (Sastroadmodjo, 1995). Struktur politik erat kaitannya dengan distribusi nilai yang sifatnya orotitatifn artinya dipengaruhi oleh alokasi serta penggunaan kekuasaan dan kewenangan. Setidaknya terdapat dua komponen pokok dari struktur politik yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Suprastruktur politik merupakan struktur politik kenegaraan atau pemerintahan (Sastroadmodjo, 1995). Jenis ini terkait suasana kehidupan politik

pemerintahan yang sangkut pautnya dengan lembaga-lembaga kenegaraan, wewenang dan fungsi lembaga-lembaga kenegaraan serta hubungan kerjasama antar lembaga-lembaga kenegaraan. Hal ini tertulis dalam UUD 1945 dan peraturan lainnya. Sedangkan infrastruktur politik artinya struktur politik masyarakat (Sastroadmodjo, 1995). Jenis ini berkaitan dengan kehidupan politik masyarakat terkait pengelompokan warga negara ke dalam berbagai golongan untuk memetakan kekuatan sosial politik masyarakat. Infrastruktur politik lebih lanjutnya terbagi menjadi beberapa komponen seperti partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, media komunikasi, serta tokoh politik.

Unsur struktur politik dan perilaku politik untuk dapat membantu terjawabnya sub pokok masalah ini. Sebelumnya sudah diketahui bahwa struktur politik terbagi menjadi dua komponen yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Keduanya memiliki perilaku politiknya masing-masing. Suprastruktur politik memiliki fungsi khusus yang melekat pada lembaga-lembaga pemerintahan, diantaranya fungsi legislatif (membuat kebijakan), fungsi eksekutif (melaksanakan kebijakan), dan yudikatif (pengadilan). Artinya perilaku politik dalam suprastruktur politik tidak lain adalah perilaku politik dalam konteks menjalankan ketiga fungsi tersebut.

Di sisi lain infrastruktur menjalankan fungsinya sendiri yaitu fungsi masukan. Fungsi masukan artinya fungsi untuk memberikan informasi atau bahan masukan untuk diproses oleh sistem dan tenaga yang tersedia untuk keberlangsungan sistem tersebut. Setidaknya terdapat dua unsur dalam fungsi masukan diantaranya tuntutan dan dukungan. Tuntutan maksudnya hasrat, keinginan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui partai politik serta kelompok kepentingan. Sedangkan dukungan adalah pandangan dan tindakan demi memberikan dukungan untuk berjalannya sistem politik.

Elit politik juga menjadi pelaku utama dalam suatu sistem politik. Secara etimologis, birokrasi artinya adalah orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Dalam kaitannya dengan politik, birokrasi dapat diartikan sebagai bentuk dari aparat pemerintahan yang menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pembuat keputusan (Sastroadmodjo, 1995). Pelaksanaan kebijakan tersebut melalui

tahapan-tahapan oleh berbagai badan atau lembaga yang masing-masing memiliki tugas pokok yang berbeda.

Seperti yang telah diketahui bahwa elit politik mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membuat dan memutuskan suatu keputusan politik. Seseorang dapat menjadi elit dikarenakan berbagai faktor, seperti faktor status sosial, keturunan, kecerdasan, ekonomi, dan keunggulan lainnya. Lalu bagaimana interaksi elit dengan massa nya? Masyarakat yang menggunakan menganut model elit yang memerintah dimana distribusi kekuasaan politik hanya dipegang oleh sebagian masyarakat dengan keunggulan tersebut. Sedangkan dalam masyarakat pluralis, terjadi transaksi kekuasaan antara massa dengan elitnya. Maksudnya, elit yang berkuasa memperoleh kekuasaannya atas dasar standar kualitas yang telah ditentukan oleh masyarakat bersangkutan. Disisi lain, model kerakyatan menekankan bahwa elit merupakan manifestasi dari rakyat sehingga terdapat bentuk perwakilan.

Dalam kaitannya dengan interaksi antara massa dengan elitnya, dapat dilihat pula melalui dimensi kepemimpinan. Yang dimasukan dengan dimensi kepemimpinan adalah terjadi suatu proses interaksi yang memunculkan pemimpin. Interaksi yang muncul kemudian adalah antar yang dipimpin dengan yang memimpin. Dengan kekuasaan yang dimiliki pemimpin berusaha untuk mempengaruhi yang dipimpin untuk mengarahkan tindakannya kepada tujuan kolektif dan membuat pola kelakuan berdasarkan pada nilai-nilai yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas. Dapat dipahami bahwa segmentasi dalam perilaku politik sangat luas. Namun yang akan didalami melalui penelitian ini adalah pada partisipasi politik dan perilaku memilih. Kedua poin tersebut akan dijelaskan secara terpisah untuk memahami hubungannya pada penelitian ini.

1.5.5 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara secara aktif untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah, baik secara langsung dengan memilih pemimpin negara atau secara tidak langsung seperti mempengaruhi kebijakan pemerintah. Unsur ini merupakan aspek yang sangat

penting dalam suatu tatanan negara yang demokrasi, di sisi lain dapat dikatakan juga sebagai ciri khas dari adanya modernisasi politik (Sastrodmodjo, 1995).

Dalam masyarakat tradisional yang kepemimpinan politik sangat bergantung pada segelintir elit penguasa, keterlibatan masyarakat baik seperti pembuatan keputusan sangat kecil bahkan dalam beberapa kasus sama sekali tidak ada. Masyarakat yang sederhana dan dianggap awam cenderung tidak dilibatkan dalam proses politik. Sedangkan pada negara modern, umumnya partisipasi politik masyarakatnya lebih tinggi.

Beberapa ahli turut mendefinisikan apa itu partisipasi politik. Salah satunya McClosky (1972) mendefinisikan partisipasi politik sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat melalui keikutsertaannya dalam proses pemilihan penguasa, serta baik secara langsung maupun tidak langsung turut dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan. Hal yang menjadi fokus terletak pada kegiatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pada hubungannya dengan negara-negara berkembang, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1990) juga memberikan pengertian dari partisipasi politik. Menurut mereka partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk memengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat kolektif maupun individual, spontan maupun terorganisir, sporadis maupun mantap, dengan kekerasan maupun dengan damai, legal maupun ilegal dan efektif maupun tidak efektif.

Pada negara demokrasi, konsep dari partisipasi politik berakar dari paham akan kedaulatan rakyat, yang dilakukan bersama-sama untuk menentukan tujuan dan masa depan masyarakat tersebut serta untuk menetapkan orang yang akan menjadi pemimpin. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah penjelmaan dari penyelenggaraan kekuasaan politik oleh rakyat (Budiardjo, 2008).

Masyarakat yang turut berpartisipasi dalam suatu proses politik, seperti memberikan suara dan lain-lain, terdorong oleh keyakinan bahwa dengan bertindak bersama-sama setidaknya dapat menyalurkan kepentingan mereka yang sedikit banyak dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Artinya mereka percaya bahwa tindakan mereka dapat memberikan dampak atau efek politik. Sehingga dapat

diketahui abwah partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik. Karena orang-orang sadar bahwa dirinya sedang diperintah, maka mereka menuntut untuk diberikan hak dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Kesadaran politik umumnya dimulai dari kalangan berpendidikan, orang-orang terkemuka, dan orang-orang yang hidupnya sudah sejahtera. Di Eropa contohnya, awalnya hanya pada elite masyarakat yang memiliki perwakilan di pemerintahan. Di Amerika Serikat perempuan baru dapat berpartisipasi dalam politik setelah awal abad 20. Demikian secara perlahan hasrat untuk berpartisipasi dalam politik menyebar keseluruh lapisan masyarakat.

Umumnya pada negara demokrasi, terdapat anggapan lebih baik apabila partisipasi masyarakat lebih banyak atau meningkat. Masyarakat diasumsikan mengikuti dan memahami masalah politik sehingga mau turut berpartisipasi di dalamnya. Di sisi lain kondisi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki legitimasi yang tinggi dari masyarakat. Oleh sebab itu, pembatasan partisipasi yang umum terjadi di masa lalu sekarang sudah banyak ditinggalkan.

Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik masyarakat mengindikasikan kondisi yang kurang baik. Karena dapat diasumsikan bahwa banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap masalah kenegaraan. Sehingga dikhawatirkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kurang memperhatikan kepentingan masyarakat karena tidak adanya masukan oleh masyarakat kepada pemerintah. Akibatnya kebijakan hanya mementingkan sebagian kecil kelompok. Kemudian negara yang rendah partisipasinya dinidikasikan menunjukkan tingkat legitimasi yang rendah juga terhadap pemerintahnya.

Setidaknya terdapat lima faktor yang mempengaruhi partisipasi politik mendapat masyarakat:

- i. Faktor yang pertama adalah modernisasi. Segala bidang terimplikasi oleh modernisasi sehingga terjadilah komersialisasi pertanian, peningkatan urbanisasi, peningkatan literasi, industrialisasi, peningkatan pendidikan, dan perkembangan pesat media massa sehingga jangkauan komunikasi menjadi lebih luas. Segala kemajuan ini mengakibatkan meningkatnya kesadaran partisipasi masyarakat, baik dari kalangan buruh, pedagang, serta

profesional untuk dapat ikut serta dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pengambilan keputusan.

- ii. Faktor yang kedua adalah perubahan yang terjadi pada struktur kelas sosial. Perubahan pada struktur kelas sosial disebabkan oleh terbentuknya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang semakin banyak pada era modernisasi dan industrialisasi. Melalui hal tersebutlah timbul permasalahan mengenai siapakah yang sekiranya berhak untuk dapat ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik yang pada akhirnya mengarah pada pola partisipasi politik.
- iii. Faktor yang ketiga adalah meningkatnya pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa. Munculnya berbagai ideologi baru seperti nasionalisme, egaliterisme, dan liberalisme mengakibatkan bangkitnya tuntutan untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan pengambilan keputusan politik. Meningkatnya komunikasi yang semakin meluas juga mempermudah penyebaran berbagai ideologi diatas kepada seluruh lapisan masyarakat. sehingga, masyarakat yang masih tradisional sekalipun dapat memperoleh pemahaman akan berbagai ideologi tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap pada tuntutan rakyat untuk dapat ikut serta dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan pemerintah.
- iv. Faktor yang keempat adalah konflik antar pemimpin politik. Persaingan antar pemimpin politik untuk memperoleh kemenangan tentunya membutuhkan dukungan massa. Sehingga sah dalam konteks ini apabila mereka memiliki anggapan bahwa yang mereka perbuat adalah untuk kepentingan rakyat dan dalam usahanya untuk memperjuangkan partisipasi massa. Akibatnya, muncul tuntutan mengenai hak-hak rakyat, baik HAM, demokratisasi, keterbukaan, dan pembebasan pers. Sehingga konflik dan perjuangan kelas menengah dengan kelas bangsawan sebagai pemegang kekuasaan berujung pada perluasan hak pilih bagi rakyat.
- v. Faktor yang kelima adalah semakin meluasnya ikut campur pemerintah baik dalam hal ekonomi, sosial hingga kebudayaan. Implikasinya, merangsang

pertumbuhan berbagai tuntutan yang terorganisir untuk dapat ikut serta dalam mempengaruhi pembentukan keputusan politik.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Teori Perilaku Memilih

Partisipasi warga negara dalam pemilu adalah serangkaian kegiatan untuk membentuk suatu keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih pada pemilu. Apabila memutuskan untuk memilih, maka partai atau calon manakah yang nanti akan dipilih. Alasan memilih menentukan pilihannya terhadap suatu calon atau suatu partai politik dapat dipahami dengan menggunakan salah satu teori turunan dari teori Perilaku Memilih (*voting behavior*). Setidaknya terdapat tiga pendekatan dalam teori Perilaku Memilih, yakni pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional.

Pendekatan sosiologis dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang menjelaskan perilaku memilih yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan prinsip atas kesamaan karakteristik. Pendekatan ini awalnya berasal dari Eropa Barat dan kemudian dikembangkan oleh berbagai ilmuwan sosiologi dan politik di seluruh Eropa maupun Amerika Serikat. Model pertamanya dikenal sebagai Mazhab Columbia yang digagas oleh Lezarsfield dan beberapa ilmuwan politik dan sosial dari Columbia's University Bureau of Applied Social Science (Erowati, 2004). Ada beberapa poin dalam mazhab ini:

a. Latar Belakang Sosiologis

Faktor-faktor yang merupakan bagian dari latar belakang sosiologis seperti jenis kelamin, agama, usia, wilayah, dan lain-lain adalah faktor yang penting dalam menentukan pilihan politik suatu masyarakat atau individu.

Keterkaitan antara jenis kelamin dan pemilihan umum sulit dikesampingkan. Terbukti dalam banyak penelitian menunjukkan bahwa pemilih wanita cenderung memilih calon atau kandidat yang juga wanita. Kemudian agama, Wald dan Shye dalam penelitiannya menemukan bahwa individu yang terlibat dalam suatu aktivitas keagamaan akan besar

kecenderungannya untuk memfavoritkan atau memilih kelompok-kelompok sayap kanan atau partai yang mengusung keagamaan (Asfar, 2006).

Usia juga penting dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Inilah mengapa dalam konstitusi Indonesia dan juga banyak negara memberikan batas minimal usia dalam mengikuti pemilihan umum. Selain itu faktor geografis atau wilayah seringkali menjadi alasan seseorang dalam menentukan pilihan politiknya. Hal ini disebabkan adanya suatu bentuk ikatan kedaerahan yang tinggi loyalitasnya.

b. Kelas Sosial

Status ekonomi individu umumnya sangat dalam menentukan pilihan politik masyarakat atau individu hampir di seluruh negara industri. Meski begitu beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelas sosial tidak selalu mempengaruhi pilihan politik seseorang di beberapa negara. Misalnya penelitian di Indonesia oleh Affan Gaffar menunjukkan pengaruh kelas sosial terhadap perilaku politik tidak terlalu signifikan. Artinya baik orang kaya maupun orang miskin tidak menentukan arah khusus terhadap calon tertentu.

c. Predisposisi Sosial-Ekonomi

Dalam studi perilaku memilih, ada dua variabel predisposisi sosial-ekonomi yang dibagi oleh Gerald Pomper, yakni predisposisi sosial-ekonomi keluarga dan predisposisi sosial-ekonomi pemilih. Masing-masing keduanya memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Predisposisi sosial-ekonomi keluarga dapat dilihat melalui pilihan politik keluarga. Sehingga individu tersebut memilih calon atau partai menurut preferensi keluarganya. Sedangkan predisposisi sosial-ekonomi tergantung pada agama yang dianut individu tersebut, juga lingkungan, keadaan demografis, kelas sosial, dan lain-lain.

Dari pendekatan sosiologis, penelitian ini akan menggunakan variabel ikatan primordial sang pemilih dengan calon yang dipilih. Dimana ikatan primordial yang dimaksud adalah kesamaan identitas atau latar belakang sosial

pemilih dengan yang dipilih. Seperti suku, ras, agama, jenis kelamin, hingga daerah tempat tinggalnya. Dengan menyertakan pendekatan ini atau variabel ikatan primordial, maka dapat diketahui apakah sang pemilih mempertimbangkan kesamaan aspek identitas mereka dengan calon yang dipilih dalam menentukan pilihannya.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ini muncul akibat adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis yang sulit diukur secara metodologis. Kali ini yang digunakan adalah Mazhab Michigan yang dikembangkan oleh Survey Research Centre Universitas Michigan, Amerika Serikat. Model ini kemudian dikenal lebih lanjut dalam buku “The American Voter” yang terbit pada tahun 1960 dan ditulis oleh Campbell, Converse, Miller, dan Stokes (Haryanto, 2014). Terdapat tiga aspek psikologi dalam pendekatan ini yang menjadi kajian utama. Diantaranya adalah aspek ikatan emosional terhadap suatu partai, aspek orientasi terhadap isu politik, dan orientasi terhadap calon atau kandidat.

Salah satu aspek dari ketiga aspek psikologi di atas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah aspek ikatan emosional terhadap suatu partai atau biasa juga disebut sebagai identifikasi kepartaian (Surbakti, 2010). Konsep ini mengarah pada persepsi pemilih terhadap partai-partai peserta pemilu, apakah ada ikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Pendekatan inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang diangkat. Yaitu berputar pada faktor psikologis pemilih seperti identifikasi kepartaian.

Hal yang perlu digarisbawahi dalam pendekatan psikologis adalah sikap politik dari pemilih tetap, dan teori ini sangat bergantung pada sikap serta sosialisasi. Sikap individu dipengaruhi oleh perilaku politiknya. Persepsi dan sikap ini terbentuk dari proses sosialisasi yang panjang sehingga dapat membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik sehingga menimbulkan identifikasi tanpa disadari oleh pemilih. Model psikologis memakai konsep kunci yaitu identifikasi partai di mana proses sosialisasi yang terjadi membentuk suatu ikatan psikologis antara pemilih dengan kandidat tertentu atau partai tertentu. Identifikasi partai adalah rasa

keterikatan seseorang dengan suatu partai politik tertentu meskipun dia bukan anggota resmi dari partai politik tersebut.

Pemilih yang dipengaruhi oleh faktor identifikasi kepartaian disebut sebagai pemberi suara reaktif (Nursal, 2004). Asumsinya adalah individu bereaksi terhadap suatu rangsangan secara pasif dan terkondisi, perilaku memilih terbentuk oleh faktor jangka panjang khususnya faktor sosial. Klasifikasi sosial dan demografi berhubungan dengan identifikasi kepartaian. Hal ini disebabkan karakter kelompok sosial dan demografi dimana pemberi suara berada penting dalam berpengaruh kepada proses pembentukan ikatan emosional pemilih dengan simbol-simbol partai. Simbol kelompok dan ikatan sejarah dapat berkaitan dengan simbol partai sehingga terbentuklah identifikasi.

Faktor emosional sangat menentukan perilaku pemberi suara dalam pendekatan psikologis sosial yang digunakan. Yang mana melibatkan peran keluarga serta lingkungan sekitar pemilih yang aktif berperan dalam proses sosialisasinya. Pola korelasi sebagai hasil dari produk budaya juga berpengaruh terhadap emosional pemilih, sama halnya dengan tokoh panutan yang menghasilkan identifikasi. Disebutkan bahwa identifikasi merupakan dorongan agar identik dengan individu lain yang dilakukan individu terhadap individu lain yang dianggapnya sesuai dalam suatu aspek. Oleh sebab itu faktor ketokohan juga memberikan pengaruh kuat dalam menentukan perilaku memilih.

Melihat pada penjelasan di atas, peneliti kemudian akan menggunakan kajian identifikasi kepartaian sebagai variabel untuk menjelaskan perilaku memilih individu melalui pendekatan psikologis. Mengingat fenomena kepartaian di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam kemajuan demokrasi di Indonesia. Sehingga perlu diketahui seberapa terikat para pemilih secara emosional dengan partai yang dipilih dalam pemilu DPR RI 2019.

Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan rasional yang pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Downs. Pendekatan ini muncul untuk menjelaskan perilaku memilih yang akhirnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. (Roth, 2008). Down menganalogikan pemilu sebagai suatu pasar, yang mana di dalamnya dibutuhkan

penawaran (partai) dan permintaan (pemilih). Dalam pendekatan ini pemilih akan rasional jika partai yang dipilih juga bertindak secara rasional.

Pendekatan rasional pada dasarnya memberikan penekanan pada motivasi seseorang dalam menentukan pilihannya adalah melalui perhitungan untung rugi dari keputusan yang diambil. Dengan kata lain, pemilih yang rasional lebih tertarik pada calon legislatif yang dapat menjamin bahwa sang pemilih akan memperoleh keuntungan terbesar dari memilih calon legislatif tersebut. Oleh sebab itu dalam menentukan pilihannya, individu diasumsikan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman dari apa yang dipilih dan pemahaman seorang pemilih akan hal yang diinginkan adalah sebuah *outcome*. Pengetahuan dan pemahaman ini dapat diperoleh dari berbagai sumber informasi yang kemudian dievaluasi untuk menjadi rasionalisasi dari suatu pilihan politik.

Meski begitu, pendekatan ini juga sering terkendala oleh kelengkapan informasi yang tersedia. Apabila informasi memang lengkap, maka tentunya akan lebih mudah dalam menentukan pilihan politiknya. Namun apabila informasi yang tersedia terbatas, maka pemilih mau tidak mau harus memilih ditengah “ketidaktahuan”. Untuk mengatasi ketidak tahuan ini, maka ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, dengan mengumpulkan informasi dari bidag-bidang yang menurut pemilih penting sehingga *outcome* masih bisa ditanggung dan tidak melebihi kemanfaatan dari informasi tersebut. Kedua, dengan memanfaatkan kinerja dari pihak lain, misalnya partai, kelompok kepentingan, dan media untuk melakukan pengumpulan, analisa, dan penyampaian informasi. Sehingga sebagian beban *outcome* dari perolehan informasi dapat ditanggung pihak lain.

Oleh sebab itu, dengan kata lain pendekatan rasional dapat dikatakan sebagai pelengkap dan kombinasi dari pendekatan sosiologis dan psikologis. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dan diketahui melalui kedua pendekatan sebelumnya dapat dijelaskan melalui pendekatan rasional. Misalnya perpindahan suara seorang pemilih tidak bisa dijelaskan menggunakan pendekatan sosiologis namun bisa dijelaskan melalui pendekatan rasional.

Dalam pendekatan rasional, variabel yang digunakan adalah pemahaman program calon legislatif. Melalui variabel ini dapat diketahui sampai mana

informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh pemilih mengenai program calon legislatif yang akan dipilih. Juga apakah informasi mengenai program tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Selain itu kepercayaan pemilih terhadap calon yang dipilih untuk dapat menjalankan programnya juga penting dalam mengetahui seberapa yakin pemilih terhadap kalkulasi untung rugi dan evaluasi mereka terhadap calon legislatif.

Melalui penjabaran diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan ketiga pendekatan tersebut. Ikatan primordial merupakan pendekatan sosiologis, identifikasi kepartaian merupakan pendekatan psikologis, dan program sang calon atau kandidat merupakan pendekatan rasional. Peneliti merasa penting untuk mempertimbangkan ketiga aspek atau variabel tersebut dengan kemudian menggunakan keseluruhan pendekatan karena kemajuan pendidikan politik yang sudah dialami oleh masyarakat selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum dan menurunnya angka golput.

Peneliti khawatir apabila hanya menggunakan salah satu pendekatan maka tidak akan cukup untuk memahami faktor sebenarnya dari alasan seorang pemilih pemula dalam memilih calon atau kandidat legislatifnya. Misalnya apabila hanya menggunakan ikatan primordial, maka tidak akan dapat diketahui seberapa banyak masyarakat yang sudah dewasa secara politik untuk dapat menentukan pilihannya secara rasional. Sebaliknya, apabila hanya bergantung pada variabel pemahaman program kandidat atau pendekatan rasional maka tidak dapat diketahui seberapa banyak masyarakat yang masih rendah pendidikan politiknya karena masih memilih berdasar pada kesamaan identitas.

1.7 Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sehingga pengujian hipotesis akan mengerecut pada pola hipotesis alternatif dimana adanya hubungan antar variabel. Hipotesis ini disebut dalam H_a . Sedangkan untuk hipotesis nihil artinya tidak diterimanya hubungan antar variabel. Hipotesis ini disebut dalam H_0 .

H_0 :

- Tidak adanya korelasi antara ikatan primordial terhadap pilihan politik etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2019.
- Tidak adanya korelasi antara identifikasi kepartaian pemilih terhadap pilihan politik etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2019.
- Tidak adanya korelasi antara pemahaman program calon legislatif terhadap terhadap pilihan politik etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2019.

H_a :

- Ada korelasi antara ikatan primordial pemilih terhadap pilihan politik pemilih etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2019.
- Ada korelasi antara identifikasi kepartaian pemilih terhadap pilihan politik pemilih etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2019.
- Ada korelasi antara pemahaman program calon legislatif terhadap pilihan politik pemilih etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2019.

1.8 Definisi Operasional

1.8.1 Ikatan Primordial

Variabel pertama yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui perilaku memilih etnis Tionghoa dalam pemilu DPR RI 2019 di Dapil DKI Jakarta III adalah ikatan primordial pemilih dengan calon yang dipilih. Ikatan primordial disini artinya adanya kesamaan latar belakang identitas antara pemilih dengan calon yang dipilih. Misalnya kesamaan ras, agama, budaya, kedaerahan, hingga hubungan kekerabatan seperti teman dan saudara. Variabel ikatan primordial juga sesuai dengan teori perilaku memilih dengan pendekatan sosilogis untuk mengetahui

bagaimana latar belakang identitas seseorang dapat memengaruhi pilihan politiknya.

1.8.2 Identifikasi kepartaian

Variabel kedua adalah identifikasi kepartaian. Maksudnya ikatan atau hubungan emosional antara pemilih dengan partai yang dipilihnya dalam pemilihan umum. Pada beberapa kasus, dapat diketahui bahwa alasan seseorang memilih calon legislatif dari partai tertentu bukan dikarenakan kualitas calon, namun karena faktor partai politiknya. Pemilih merasa memiliki hubungan yang intim dengan partai yang dipilihnya. Misalnya apakah pemilih pernah atau masih menjadi anggota atau pengurus dari partai tersebut, apakah pemilih merupakan partisipan dari partai tersebut, apakah pemilih aktif dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh partai tersebut.

Selain keterlibatan sang pemilih dengan partai secara langsung, identifikasi kepartaian juga bisa dilihat dari bagaimana pandangan sang pemilih terhadap ketua partai yang dipilihnya. Tidak sedikit kasus dimana seseorang merasa terikat dengan salah satu partai politik karena mereka memfavoritkan ketua partai tersebut. Selain itu juga faktor keluarga juga berpengaruh, maksudnya identifikasi kepartaian pemilih juga bisa dilihat dari bagaimana partai tersebut ternyata selama ini sudah diidolakan oleh orang tua atau keluarganya sejak lama, sehingga sedikit banyak sang anak mendapatkan pengaruh. Oleh sebab itu variabel ini penting untuk dievaluasi demi mengetahui perilaku memilih. Lagi pula variabel identifikasi kepartaian ini sejalan dengan teori perilaku memilih dengan pendekatan psikologis.

1.8.3 Pemahaman Program Calon Legislatif

Pemahaman program calon legislatif artinya bagaimana pemilih memahami setiap program dan narasi yang dijanjikan oleh sang calon legislatif kepada calon pemilih di daerah pilihannya selama masa kampanye. Tentunya janji-janji ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk dapat menarik suara. Variabel ini penting untuk dimasukkan ke dalam penelitian, karena di masyarakat ada juga yang lebih mempertimbangkan janji sang calon yang akan

dipilih secara rasional. Maksudnya sang pemilih mempertimbangkan untung rugi dari janji-janji program calon legislatif yang dilemparkan kepada masyarakat.

Dengan menimbang apakah program yang dijanjikan dapat memberikan keuntungan kepada pemilih atau justru merugikan pemilih, maka sang pemilih dapat menentukan pilihannya kepada calon legislatif yang dia anggap dapat memberikan keuntungan terbaik kepadanya. Pemilih juga terkadang tidak hanya mempertimbangkan program salah satu calon legislatif, namun juga membandingkan program calon legislatif lainnya. Mempertimbangkan program ini termasuk langkah rasional yang dalam teori perilaku memilih masuk kedalam pendekatan rasional.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah perilaku memilih etnis Tionghoa dalam Pemilu legislatif 2019. Dengan menitikberatkan pada ada tidaknya korelasi antara ikatan primordial pemilih, identifikasi kepartaian dan pemahaman program calon legislatif terhadap pilihan politik etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III dalam Pemilu legislatif DPR RI tahun 2019.

1.9.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kuantitatif. Dimana penelitian dengan metode kuantitatif menekankan pada penggunaan angka-angka dan analisis statistik (Sugiyono, 2015). Penelitian kuantitatif pada dasarnya dilakukan untuk menguji hipotesis. Melalui metode kuantitatif maka dapat diketahui ada tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti. Lebih spesifiknya, dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis statistik deskriptif. Dimana pada jenis ini, kesimpulan yang diambil dari hasil analisis data tidak mewakili seluruh populasi namun hanya dari sampel yang diambil. Penggunaan teknis penelitian ini juga disebabkan data populasi yang tidak diketahui untuk dapat menghitung sampel secara akurat.

1.9.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini mencakupi Dapil DKI Jakarta III yang mana di dalamnya terdapat wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Jakarta Barat terdapat 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Tambora, Kecamatan Kebun Jeruk, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Palmerah dan Kecamatan Kembangan. Kemudian terdapat 6 kecamatan di Jakarta Utara, diantaranya Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, Kecamatan Pademnagan, Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Tanjung Priok.

Dapil DKI Jakarta III dipilih sebagai objek penelitian karena pada dapil inilah terdapat pusat pemukiman dan pusat perekonomian masyarakat etnis Tionghoa sejak jaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Selain itu dapil ini juga menjadi satu-satunya dapil yang terdapat caleg lolos beretnis Tionghoa, dan tidak hanya satu namun dua yakni Darmadi Duriyanto dan Charles Honoris. Sedangkan pada dapil lain tidak ditemukan satupun caleg beretnis Tionghoa yang berhasil lolos ke DPR RI.

1.9.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang diantaranya terdapat subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan kualitas yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan setelahnya ditarik kesimpulan (Sugiono, 2015: 117). Meskipun tidak ada instansi pemerintah yang menyediakan data khusus mengenai jumlah pemilih beretnis Tionghoa dalam Pemilu 2019, sehingga tidak ada data akurat yang dapat menunjukkan populasi pemilih beretnis Tionghoa. Tetap yang menjadi populasi adalah warga DKI Jakarta beretnis Tionghoa dari Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang sudah memilih dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2019.

Namun karena teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *cluster sampling*, yang mana sampel hanya diambil dari sebagian daerah tertentu berdasarkan klaster-klaster. Sehingga tidak semua kecamatan diambil sampelnya. Dari kotamadya Jakarta Barat ada tiga kecamatan yang dijadikan objek pengambilan sampel yakni Grogol Petamburan, Taman Sari, dan Tambora. Sedangkan dari kotamadya Jakarta Utara ada tiga kecamatan juga yang dijadikan

objek pengambilan sampel yakni Kelapa Gading, Pademangan, dan Penjaringan. Keenam kecamatan ini dipilih karena masing-masing kecamatan terkenal sejak lama karena wilayah pecinannya dan dekat dengan pusat ekonomi etnis Tionghoa.

Dalam menentukan jumlah sampel atau jumlah responden yang menjadi objek dari penelitian ini maka digunakan rumus Lemeshow (1997), sebab jumlah populasi yang tidak diketahui. Dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 pq}{d^2}$$

n = jumlah minimal sampel yang diperlukan

Z = skor Z pada kepercayaan 95% = 1,96

p = 0,5

q = 1-p

d = alpha (0,10) atau sampling error = 10%

Dengan rumus tersebut, detail perhitungan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}{0,1^2} = \frac{0,9604}{0,01} = 96,04 \text{ (96)}$$

Artinya minimal jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 responden. Namun, karena peneliti ingin meningkatkan ketepatan dari penelitian ini maka peneliti mengumpulkan responden lebih dari jumlah minimal yang ditetapkan rumus (96 responden). Sehingga dengan proses selama satu bulan pengumpulan sampel, diperoleh jumlah sampel yang terkumpul dari penelitian ini sebanyak 250 responden, namun jumlahnya tidak terbagi rata di setiap kecamatan. Hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi ketika penelitian ini dilakukan sehingga pengumpulan sampel tidak bisa dilakukan secara langsung demi memastikan data yang terkumpul maksimal dan merata.

1.9.5 Variabel Penelitian

a. Variabel Independen

Variabel ini dikenal juga sebagai variable bebas atau variable X. Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab dari adanya perubahan terhadap variabel terikat atau dependen.

Dalam penelitian ini, variable independent yang digunakan adalah:

- a. Ikatan Primordial
 - Apakah pemilih memilih calon legislatif atas dasar kesamaan etnis?
 - Apakah pemilih memilih calon legislatif atas dasar kesamaan agama?
 - Apakah pemilih memilih calon legislatif atas dasar kekerabatan?
- b. Identifikasi kepartaian
 - Apakah pemilih mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari partai tertentu?
 - Apakah pilihan politik pemilih dipengaruhi oleh kepemimpinan atau ketokohan dari ketua partai politik tertentu?
- c. Pemahaman program calon legislatif
 - Apakah pemilih mengetahui program dari calon legislatif yang akan dipilih?
 - Apakah pemilih mempertimbangkan program calon legislatif sebagai alasan memilih calon legislatif tersebut?

b. Variabel Dependen

Variabel ini dikenal juga sebagai variable terikat atau variable Y. Variabel ini adalah variable yang dipengaruhi oleh variable bebas.

Dalam penelitian ini yang termasuk dari variable Y atau variable dependen adalah pilihan politik etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III dalam Pemilu Legislatif DPR tahun 2019.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan rangkaian pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2015). Metode kuesioner ditujukan untuk mengumpulkan data dari responden mengenai variabel identifikasi kepartaian dan tingkat kepercayaan partai.

Mengingat kondisi pandemi Covid-19 ketika penelitian ini dilakukan, maka penyebaran kuesioner tidak bisa dilakukan secara langsung. Sehingga peneliti

menggunakan platform *google form* untuk menjadi sarana penyebaran kuesioner secara online. Kuesioner yang berbentuk *google form* tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial baik Instagram, Line, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kuesioner tersebut berisikan persyaratan yang menyebutkan bahwa responden harusnya warga negara Indonesia, ikut memilih dalam pemilu 2019, beretnis Tionghoa, dan tinggal di kecamatan yang menjadi lokasi penelitian yakni Grogol Petamburan, Tambora, Taman Sari, Kelapa Gading, Penjaringan, dan Pademangan.

1.9.7 Teknik analisis data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden sudah terkumpul (Sugiyono, 2015). Kegiatan tersebut diantaranya meliputi pengelompokan data berdasarkan jenis responden dan variabel, tabulasi data yang didasari oleh variabel dari seluruh responden, melakukan penyajian data variabel, dan menghitung untuk menguji hipotesis. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% atau taraf kepercayaan 95%, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara ikatan primordial, identifikasi kepartaian pemilih dan pilihan politik etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III dalam pemilu DPR RI tahun 2019.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis menggunakan tabel frekuensi dengan program aplikasi SPSS 25. Dalam penelitian ini, jenis analisis yang digunakan adalah uji Chi-Square Pearson. Jenis analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel. Uji Chi-Square sangat bergantung pada jumlah sampel, semakin besar sampelnya maka nilai chi-square akan semakin bertambah (Priyono, 2016).